



**KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA**

**KAJIAN HUKUM
ANALISIS KEBUTUHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI UMKM TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

A. Persoalan

1. Terjadinya pemisahan struktur organisasi yang semula Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi dua kementerian terpisah, sehingga diperlukan panduan tentang Tata Naskah Dinas untuk pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Setelah pemisahan kementerian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian UMKM.
3. Terdapat reviu dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, agar untuk disempurnakan, yaitu terkait: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, format naskah dinas, sistem penomoran, penggunaan kop surat dan stempel dinas.

B. Pra-anggapan

1. Penetapan Peraturan Menteri ini akan memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas serta mewujudkan keseragaman dan keserasian dalam pembuatan naskah dinas sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.
2. Adanya ketentuan yang jelas bagi pegawai dalam pembuatan surat dinas dan nota dinas di lingkungan Kementerian demi kelancaran proses administrasi persuratan.

C. Fakta yang Mempengaruhi

1. Struktur Organisasi Baru: Terbentuknya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 memerlukan penyesuaian regulasi internal terkait instrumen kearsipan.
2. Instrumen Kearsipan: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan jadwal retensi arsip.
3. Reviu dari ANRI: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, format naskah dinas, sistem penomoran, penggunaan kop surat dan stempel dinas.

D. Analisis

1. Latar Belakang dan Urgensi Hukum

- Penyusunan Peraturan Menteri ini merupakan langkah strategis sekaligus kewajiban hukum pasca terjadinya pemisahan struktur organisasi yang semula Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Secara yuridis, regulasi ini diperlukan untuk mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Tanpa adanya Permen ini, kementerian tidak memiliki dasar hukum terkait instrumen kearsipan bagi instansi yang baru terbentuk ini.

2. Masalah yang Diselesaikan (*Problem Solving*).

Regulasi ini dirancang untuk menjawab beberapa ketidakpastian administratif pasca pemisahan kementerian, antara lain:

- Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas: Memberikan panduan baku mengenai penggunaan naskah dinas surat perintah dan surat tugas.
- Format naskah dinas: Memberikan kemudahan dalam pembacaan dan estetika sistematika naskah dinas penulisan cetak tebal untuk subbab Naskah dinas arahan. Selain itu juga ada penghilangan unsur tempat sebelum tanggal pada titi mangsa dalam surat dinas, karena sekarang eranya Tanda Tangan Elektronik, di mana penandatanganan tidak terbatas tempat dan waktu.
- Sistem Penomoran: Dalam kombinasi penomoran, menggunakan kode jabatan penandatanganan sebagai pembeda unit kerja. Sehubungan dengan adanya pemisahan Kementerian, Kode Jabatan untuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menambahkan kata "UMKM" di belakang kode urutan angka dan menghilangkan unsur bulan dalam angka romawi karena unsur tersebut tidak ada urgensi manfaatnya dalam penomoran.
- Penggunaan Kop Surat dan Stempel Dinas: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah meluncurkan Logo Kementerian baru pada tanggal 15 Januari 2025 sehingga implementasi penggunaan logo mulai digunakan penyesuaian untuk berbagai media termasuk penggunaan Kop Surat dan Stempel Dinas. Oleh karena itu penggunaan kop surat dan Stempel dinas baik untuk Menteri, Wakil Menteri, dan Kementerian perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Komponen Strategis Pengaturan.

Berdasarkan analisis naskah urgensi, terdapat beberapa poin kunci yang akan diatur:

- Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas: membedakan penggunaan naskah dinas surat perintah dan surat tugas.
- Sistem penomoran: menambahkan kata "UMKM" dibelakang kode urutan angka dan menghilangkan unsur bulan dalam angka romawi karena unsur tersebut tidak ada urgensi manfaatnya dalam penomoran.

- Penggunaan kop surat dan stempel dinas: Memberikan kepastian bahwa pemotongan tunjangan tidak dikenakan untuk pegawai yang mengambil cuti tahunan dan cuti melahirkan.
4. Dampak yang Diharapkan
- Secara organisasi, penetapan Permen ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme: Menjadi instrumen efektif untuk penggunaan naskah dinas surat perintah dan surat tugas, Format naskah dinas, Sistem Penomoran, dan Penggunaan Kop Surat dan Stempel Dinas.

E. Simpulan

Saat ini, diperlukan pedoman yang jelas untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas serta mewujudkan keseragaman dan keserasian dalam pembuatan naskah dinas sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Kegunaan dari penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai pedoman dalam pembuatan surat yang meliputi Penomoran Naskah Dinas, Penggunaan Kata Penyambung, Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas, Bentuk dan Spesifikasi Cap/Stempel Dinas, Bentuk Paraf, Pengamanan Naskah Dinas, dan Kewenangan Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas.

F. Saran

1. Pembentukan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat mendesak untuk segera ditetapkan guna sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tata Naskah Dinas sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian demi kelancaran proses administrasi persuratan.
2. Mengingat metode penyusunan telah melalui pendekatan yuridis-normatif dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu ANRI disarankan agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini segera dilaksanakan untuk dijadikan pedoman dalam proses penciptaan dan distribusi arsip di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.